

## ABSTRAK

### **AHMAD ROMZY: LEGITIMASI FUNGSI LEMBAGA LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI PERIODE 2014 – 2019. Program Pascasarjana Uniska Kediri.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 serta untuk mengetahui faktor apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 dan solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang didapatkan dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi serta beberapa pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer baik data dari internet maupun kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah yang sudah dibahas hanya ada 1 (satu) peraturan daerah yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 lebih banyak bertindak hanya dalam hal pembahasan dan pengesahan saja, bukan pencetus ide. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 antara lain: Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat; Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan; Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah dan partai yang memiliki kursi terbanyak; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam

pelaksanaan di lapangan. Dari hambatan- hambatan tersebut solusinya adalah : Susun Prolegda dengan koordinasi Pemda; Masyarakat dan *Stake Holder* perlu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan suatu Peraturan Daerah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam tertampung; Kaji dan Evaluasi daftar Tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD; Anggota DPRD harus bisa merubah *mindset* dari *Taylor* menjadi *Designer* Kebijakan; Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Legislatif harus mampu difungsikan secara baik; Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan harus dipertimbangkan dengan cermat dan teliti.

Kata kunci: Pelaksanaan, fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri

## ABSTRACT

**AHMAD ROMZY: THE IMPLEMENTATION OF HOUSE OF REPRESENTATIVE OF KEDIRI REGENCY'S LEGISLATION FUNCTION. Post Graduate Program Uiska University.**

*The purpose of this research is to how House of Representative of Kediri Regency 2014- 2019 period use their legislation function and to know what factor that obstruct them and the solution.*

*This research is non doctrinal research and descriptive research. Research location is in Kediri Regency. This research use primary and secondary data. The data was collected by interview and library research. The data analisys use interactive data model.*

*From the research we can know that they use their legislation function appropriate with national law, but they don't use their initiative right because there is one region law only from their initiative. The obstruction are : long term law planning is not easy; they do not involve the stake holder optimally; executive wills oriented ; need more cooperation of inter government institute ; they don't really know human resource and facilities in their regency. From the obstruction above the solutions are : program the regional law with local government ; check regional law waiting list ; they have to change their mindset from taylor to law designer ; they have to know the regional plan and all new law ; use the legislative organ function maximally ; make a good internal rules of game; they have know their function and rights.*

*Key words : implementation, legislation function, house of representative of kediri regency*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	10
I.3 Tujuan Penelitian .....	10
I.4 Kegunaan Penelitian .....	11
I.5 Metodologi Penelitian .....	11
I.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
II.1. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah .....	13
1. Pemerintah Daerah .....	13
2. Asas-asas Pemerintah Daerah .....	14
3. Teori Desentralisasi .....	15
4. Prinsip-prinsip Pemerintah Daerah .....	17
5. Otonomi Daerah .....	18
II.2. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	20
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .....	20

2. Keanggotaan, Alat Kelengkapan Serta Tugas Pokok dan Fungsi	
3. Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.....	20
4. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .....	31
5. Wewenang, Tugas dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota .....	31
III.3. Tinjauan Umum tentang Fungsi Legislasi .....	33

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 34**

### **III.1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014 – 2019? ..... 34**

III.1.2 Deskripsi Pemerintah daerah Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kediri.....	34
A. Gambaran Kabupaten Kediri .....	34
B. Demografi Kabupaten Kediri.....	43
C. Gambaran Perekonomian Kabupaten Kediri .....	48
D. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri .....	50
III.1.3. Gambaran Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 20014-20019 .....	51
A. Gambaran Umum Sekretariat Dprd Kabupaten Kediri.....	60
B. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	62
C. Struktur Organisasi.....	76
D. Visi Misi.....	77
III.I.4 Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014-2019 .....	78
A. Realisasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Dairi Periode 2014-2019.....	79
III.I.5 Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah .....	84

A. Produktivitas.....	84
B. Kualitas Pelayanan Publik.....	86
C. Responsivitas.....	89
D. Responsibilitas.....	91
E. Akuntabilitas.....	93
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014 –2019 .....	52
E. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014 –2019 .....	52
F. Hasil Pelaksanaan Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakya Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014 –2019 .....	52

**III.2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014 – 2019**

..... **92**

II.2.1 Solusi Faktor – Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Periode 2014 -2019 ..... 95

**BAB IV PENUTUP**

IV.I. Kesimpulan.....	98
VI.2. Saran .....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN